

3. KARAKTERISTIK KSATRIAN AMJI ATTACK

3.1. SEJARAH BRIMOB

Brimob Polri yang ada sekarang dapat dianggap sebagai pewaris langsung dari satuan polisi yang dibentuk pada masa kolonial Belanda. Pada tahun 1912, Pemerintah Hindia Belanda membentuk satuan polisi bersenjata yang dinamakan **Gewapende Politie**, dan kemudian digantikan satuan lain yang bernama **Veld Politie**. Kedua satuan ini memiliki tugas yang sama, antara lain: bertindak sebagai unit reaksi cepat, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, mempertahankan hukum sipil, menghindarkan munculnya suasana yang memerlukan bantuan militer, dan konsolidasi atas wilayah yang baru dikuasai.

Pada masa pendudukan Jepang, pada bulan April 1944 dibentuk satuan polisi khusus yang bernama **Tokubetsu Keisatsu Tai** di setiap daerah di Pulau Jawa. Anggotanya terdiri dari para Polisi muda dan pemuda Polisi, yang dididik dan dilatih kemiliteran oleh tentara Jepang dengan kemampuan yang lebih dari polisi biasa, berdisiplin tinggi, dan terorganisasi. Satuan polisi khusus ini diperlengkapi dengan persenjataan lengkap dan kendaraan lapis baja, dengan tugas utama untuk merespons sejumlah ancaman utama terhadap keamanan, termasuk demonstrasi, kerusuhan, dan perampokan bersenjata.

Pasca Proklamasi Kemerdekaan, pada tanggal 21 Agustus 1945, Komandan Satuan Polisi Khusus Jawa Timur Inspektur Polisi Tk.I M. Jasin mengatas namakan seluruh warga polisi mengeluarkan pernyataan yang diketik pada selembar surat yang berbunyi:

“Oentoek bersatoe dengan rakjat dalam perjoengan mempertahankan Proklamasi 17 Agoestoes 1945, dengan ini menjatakan Poelisi sebagai Poelisi Repoeblik Indonesia”

Soerabaja, 21 Agoestoes 1945

ttd

Moehammad Jasin

Inspektoer Poelisi Tk. I

Satuan Polisi Khusus menolak menyerahkan senjata dan di seluruh Jawa terlibat dalam aksi penolakan terhadap Belanda dan Sekutu.

Pada saat itu masih banyak sebutan untuk Satuan Polisi Khusus, seperti Polisi Istimewa, Pasukan Polisi Istimewa, atau Barisan Polisi Istimewa. Untuk penyempurnaan Pasukan Polisi Istimewa, Wakil Kepala Kepolisian Negara Komisaris Tk.I Soemarto berinisiatif merubah nama Pasukan Polisi Khusus menjadi *Mobile Brigade*, dengan pertimbangan agar Pasukan Polisi Istimewa menjadi Kesatuan Pasukan yang berdisiplin tinggi, kompak, loyal, penuh dedikasi, dan mampu bergerak secara cepat dan dinamis.

Pada tanggal 17 September 1946, Kepala Kepolisian Republik Indonesia R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo memberi kuasa kepada Komisaris Polisi M. Jasin untuk melakukan berbagai persiapan pembentukan *Mobile Brigade*. Berdasarkan Surat Perintah Kepala Muda Kepolisian No.Pol.: 12/78/91, secara *de jure* dinyatakan *Mobile Brigade* atau *Mobrig* lahir, sebagai wujud penghargaan pimpinan kepada para pejuang dari anggota pasukan Polisi Istimewa yang gugur sejak 14 November 1945.

Sebagai organisasi baru dan sedang berkembang, Mobrig terlibat aktif dalam melawan Agresi Militer Belanda I dan II dari tahun 1947 sampai dengan tahun 1949, penumpasan pemberontakan Partai Komunis di Madiun pada tahun 1949 – 1950, dan operasi penumpasan APRA Kapten Westerling di Sulawesi Selatan dan Bandung.

Setelah tahun 1950, barulah tersusun suatu organisasi yang mendekati kesempurnaan, dengan pembentukan Rayon Mobrig pada tingkat karesidenan dan kompi *reserve* di tingkat propinsi. Ditingkat pusat, dibentuk Inspeksi Mobile Brigade Pusat yang berkedudukan di Purwokerto dengan tugas membantu Kepala Djawatan Kepolisian Negara mengenai seluk beluk yang berhubungan dengan Mobrig.. Dan pada tahun 1951, dibentuklah kompi-kompi di setiap kabupaten.

Berdasarkan Surat Keputusan Departemen Kepolisian Negara No.Pol. : 13/MB/1959, pada tanggal 25 April 1959 kesatuan Mobrig yang semula berbentuk kompi diubah susunannya menjadi tingkat batalyon. Koordinator Mobrig daerah berubah menjadi Komandemen Daerah dan Koordinator Mobrig Djawatan kepolisian Negara berubah menjadi Komandemen Mobrig Pusat (Komobpu).

Dalam era tersebut, Mobile Brigade terlibat dalam penumpasan pemberontakan dan aksi separatisme DI/TII Andi Aziz di Sulawesi Selatan dan DI/TII Kartosuwirjo di Jawa Barat, pemberontakan Daud Beureueh di Aceh, pemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, aksi separatisme Republik Maluku Selatan, serta PRRI/Permesta di Sumatera, Sulawesi, dan Maluku.

Pada Ulang Tahun ke 16 Mobrig tanggal 14 November 1961, berdasarkan Surat Order Y.M. No.Pol. : 23/61 tertanggal 12 Agustus 1961, pemerintah

menganugerahi penghargaan tertinggi saat itu yaitu **Nugraha Cakanti Yana Utama** kepada Mobrig yang diserahkan oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno atas pengabdian dan kesetiaan Mobrig dalam mempertahankan kemerdekaan dan menumpas pemberontakan. Bersamaan dengan perayaan ulang tahun itu pula Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno meresmikan perubahan nama Mobile Brigade menjadi Brigade Mobile (Brimob). Dalam periode pemerintahan Orde Baru (1972 – 1997), Brimob beberapa kali mengalami validasi dan restrukturisasi organisasi. Yang paling bersejarah adalah pada tahun 1996 ketika untuk pertama kalinya Komandan Korps Brimob Polri ditingkatkan menjadi Perwira Tinggi bintang satu dan sekaligus mengesahkan Brimob Polri sebagai badan pelaksana pusat pada tingkat Mabes Polri yang berkedudukan di bawah Kapolri. Dengan struktur organisasi yang lengkap, ditetapkan pula tugas Korbrimob yaitu untuk membina dan mengerahkan kekuatan guna menanggulangi gangguan kamtibmas yang berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api atau bahan peledak, dan bersama-sama dengan unsur pelaksana operasional kepolisian lainnya mewujudkan tertib hukum dan ketenteraman masyarakat di seluruh wilayah yurisdiksi nasional Republik Indonesia.

Di era reformasi sekarang, hal-hal mendasar yang penting dalam perkembangan Brimob adalah pemisahan Polri dari TNI berdasarkan Inpres No.2 tahun 1999 yang menandai dimulainya reformasi di bidang pertahanan dan keamanan. Momentum ini disikapi Polri dengan merumuskan kembali kedudukan, tugas, dan

peran Polri yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan yang mengarah pada kehidupan negara yang lebih demokratis dalam tatanan masyarakat madani.¹

Struktur organisasi Brimob juga kembali mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Skep. Kapolri No.Pol.Kep. 53/X/2002 tertanggal 17 Oktober 2002 tentang organisasi dan tata kerja korps Brimob. Berdasarkan Surat Keputusan ini kepangkatan Kakorbrimob dinaikkan menjadi bintang dua dengan Irjen Pol.Drs. Yusuf Mangga Barani menjabat sebagai Kakorbrimob Polri. Dalam hal struktur organisasi juga terjadi perubahan dengan dihapusnya jabatan kasi intel daerah, dan dibentuknya Subden Gegana pada seluruh satuan Brimob berdasarkan Skep Kapolri No.Pol.Kep. 54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang OTK Satuan-satuan Organisasi Kepolisian Daerah (Polda)

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka sesuai dengan Skep. Kapolri No.Pol.: Skep/27/IX/2002 tanggal 20 September 2002 tentang Reformasi Brimob Polri, ditetapkan 3 (tiga) sasaran reformasi Brimob Polri, yang meliputi:

- A. Aspek struktural.
 - a. Kekuatan Brimob Polri tidak terpusat (sentralisasi) tetapi lebih diarahkan pada kewilayahan (desentralisasi pada tingkat Polda)
 - b. Struktur organisasi Brimob Polri tidak harus sama persis dengan organisasi militer
- B. Aspek instrumental.
 - a. Penyempurnaan piranti lunak yang berlaku di Brimob Polri mengarah dan mengacu pada paradigma baru Polri, Undang-undang Kepolisian, dan tuntutan masyarakat.

¹ *Reformasi Menuju Polri yang Profesional*, Tim Kelompok Kerja Reformasi Polri, 1999.

- b. Pengkajian secara terus menerus terhadap sistem dan metode oleh lingkungan Brimob Polri, guna mewujudkan anggota Brimob Polri sebagai Pelindung, Pengayom, dan Pelayan masyarakat serta penegak hukum yang profesional.

C. Aspek Kultural.

- a. Adanya perubahan yang signifikan dari perilaku anggota Brimob Polri yang militeristik menjadi anggota Brimob Polri yang berstatus sipil.
- b. Menghindari dan menghilangkan sifat kebanggaan korps yang berlebihan dan arogan pada setiap perilaku anggota Brimob Polri dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat maupun dalam melaksanakan tugas.
- c. Mengimplementasikan penggunaan program yang komprehensif dan tepat dalam rangka memupuk loyalitas setiap personel Brimob Polri kepada misi organisasi dan bukan pada pribadi pimpinan.

Dengan adanya tiga sasaran reformasi Korbrimob tersebut maka diharapkan mampu merubah pandangan masyarakat terhadap Brimob Polri. Dengan aktualisasi sikap berlandaskan motto Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan, maka Korbrimob melaksanakan reformasi pendekatan yang berbeda dari pendekatan militeristik menjadi pendekatan sipil. Hal ini sesuai dengan paradigma baru Polri sebagai Polisi yang berwatak sipil dan bercirikan Polisi Modern yaitu dari antagonis (polisi memosisikan dirinya berhadap-hadapan dengan rakyat) menjadi protagonis (polisi yang berada bersama-sama dengan rakyat) selaku Pelindung,

Pengayom, dan Pelayan masyarakat demi terciptanya kamtibmas yang selaras dengan perkembangan dan dinamika pembangunan nasional.

3.2. KONDISI LINGKUNGAN DAN SOSIAL

Mako Korbrimob Polri Ksatrian Amji Attak Kelapa Dua terletak di Jalan Akses UI, Kelurahan Pasir Gunung, Kecamatan Cimanggis, Kota Administratif Depok, Jawa Barat. Sebagai sebuah daerah suburban penunjang Ibukota, maka corak kehidupan sosial penduduk sekitar Ksatrian Amji Attak juga hampir mirip dengan penduduk kota, dengan sebagian besar berpenghasilan sebagai wiraswasta, pekerja formal di kota, dan pekerja sektor informal (pedagang, ojek, supir angkutan, dan sebagainya).

Corak budaya sosial yang berbeda ini, juga mempengaruhi pola interaksi antara anggota, terutama yang tinggal di luar ksatrian, dengan masyarakat sekitar ksatrian, baik dalam pola sosialisasi pertemanan maupun pola hubungan “aparatus – masyarakat”. Hal ini terkadang menimbulkan persepsi atas citra anggota Korps Brimob oleh masyarakat, akibat perilaku beberapa oknum anggota yang dirasakan arogan dan menyimpang seperti mabuk, dan merasa “jagoan”, walaupun persepsi masyarakat atas anggota penghuni Ksatrian Amji Attak masih baik karena sebagian besar anggota dapat membaaur dengan masyarakat dengan tetap menjaga citra dan jati diri anggota yang baik, dan turut dalam kegiatan sosial untuk masyarakat seperti kerja bakti kebersihan jalan dan bantuan keamanan.

Ksatrian Amji Attak dibangun diatas lahan seluas lebih kurang 36.000 meter persegi dengan peruntukan lahan dibagi atas Mako Korbrimob, sarana semi publik (rumah sakit/poliklinik), sarana publik (toko/koperasi), sarana sosial keagamaan,

sarana latihan, sarana pendidikan, sarana olahraga, gudang perbekalan dan *workshop* serta tempat hunian.

Sebagai tempat hunian dibangun tiga jenis tempat tinggal yaitu barak, flat, dan kopel. Setiap penghuni diberikan Surat Izin Penghunian (SIP) yang dikeluarkan oleh Kepala Detasemen Markas (Ka Denma) atas nama Kakor Brimob yang berisikan data-data spesifikasi tempat tinggal dan penghuni tempat tinggal serta ketentuan-keentuan penempatan rumah dinas yang berisi aturan-aturan penempatan, hak dan kewajiban penghuni, serta batas penempatan. Secara garis besar dapat dikatakan SIP mengatur hubungan hak dan kewajiban serta aturan atas rumah dinas antara penghuni dengan rumah yang ditempatinya berdasarkan Keputusan Menhankam/Pangab No: Kep / 28 / VIII / 1975, tanpa mencantumkan tentang tata tertib antar penghuni tempat tinggal.

Berbagai kegiatan yang teratur dan kontinyu dilakukan seluruh anggota Korps Brimob, baik yang tinggal di dalam maupun di luar Ksariaan adalah:

1. Upacara bendera di lapangan Mako Korbrimob pada tanggal 17 setiap bulannya, dimulai tepat pukul 07.00
2. Apel bersama setiap hari Selasa pada pukul 07.00, yang dilanjutkan dengan pelatihan bela diri, sedangkan untuk jenjang Perwira Menengah (Pamen) keatas diadakan acara ramah tamah di ruang transit Mako Korbrimob.
3. Apel pemeriksaan kerapihan personel dan kesiapan kendaraan dinas, pada hari Kamis pukul 07.00, sampai dengan selesai oleh tiap pimpinan per bagian.

4. Apel olah raga bersama pada hari Jumat pukul 07.00, dilanjutkan dengan lari keliling Ksatrian, dan senam.
5. Apel Siaga untuk seluruh jajaran Mako dan Satuan yang ada di Kelapa Dua, untuk pemeriksaan kesiapan *on call* situasi Kamtibmas Nusantara apabila diperlukan BKO segera, pada hari Jumat pukul 15.00

Bagi personel yang tinggal di barak (anorganik), acara yang dilakukan secara bersama termasuk jadwal makan, latihan, dan istirahat.

Acara yang dilakukan bersama-sama ini dimaksudkan selain sebagai sarana sosialisasi antar penghuni Ksatrian, juga dimaksudkan sebagai pengawasan sosial personel (*social control*) para pemimpin regu maupun oleh masing-masing personel atas personel lainnya. Seusai acara yang dilakukan secara bersama, maka diharapkan dapat tercipta suatu komunikasi antar personel. Apabila ada informasi tentang sesuatu hal yang dapat dikatakan sebagai kecenderungan penyimpangan dan pelanggaran, maka seorang anggota dapat meneruskan informasi tersebut kepada Komandan Peleton (Danton) atau Komandan Regu (Danru). Disinilah diperlukan kepekaan seorang pimpinan/komandan dalam menyaring, menggali, dan menjabarkan informasi yang diterimanya. Apabila informasi yang didapat benar dan dapat dibuktikan kebenarannya, maka Danton/Danru harus menunjukkan karakter tegas namun bijak untuk melakukan teguran ataupun tindakan korektif atas anggota regunya, maupun meneruskan penyidikan atas informasi tersebut ke tingkat Pembinaan Hukum dan Kode Etik untuk pelanggaran yang dapat dikategorikan melanggar peraturan atau pelanggaran berat. Meskipun belum dapat diukur seberapa efektifnya jalur

penerapan tindakan oleh Komandan Regu/ Komandan Peleton, namun hal tersebut masih dapat diterapkan mengingat data yang signifikan tentang tingkat kepatuhan yang masih amat tinggi dalam satuan dan pengakuan akan adanya penghormatan terhadap karakter Komandan Satuan yang dianggap bijaksana dan menghormati segala keputusannya (100% informan dari anggota Korps Brimob)

Selain dari itu, untuk mencegah adanya pelanggaran, terutama tindak pidana, di dalam Ksatrian, maka diaktifkan pula sistem penjagaan keamanan dan ketertiban di dalam Ksatriaan yang dilakukan bagian Propam dan Protokol, seperti penjagaan gerbang utama, penjagaan setiap pintu masuk Ksatriaan, Penjagaan Gudang Perbekalan dan Persenjataan, Patroli Malam pada jam-jam rawan yang ditentukan, dan Patroli Perwira Jaga tiap jam yang memiliki SOP dan sandi penjagaan tersendiri. Dengan adanya sistem keamanan dan ketertiban tersebut, maka sebagian besar penghuni merasakan bahwa Ksatriaan adalah lingkungan yang relatif dapat dikatakan aman, walaupun pernah terjadi pencurian kendaraan bermotor milik anggota yang tinggal di dalam Ksatriaan.

3.3. KOMUNITAS PENGHUNI

Dari 33.439 personel Korps Brimob seluruh Nusantara, 5.704 personel ditempatkan di Mako Korbrimob Kelapa Dua. Dari 5.704 personel tersebut, prosentase yang dapat ditampung di dalam Ksatrian Amji Attak masih kecil, sehingga masih terdapat kendala dalam pengawasan terhadap anggota yang tinggal di luar Ksatriaan. Dari 5.704 personel, 4.940 personel telah menikah, dan total jumlah anak seluruhnya adalah 4.823 jiwa. Sehingga total komunitas Mako

Korbrimob Polri Kelapa Dua, baik yang tinggal di dalam Ksatrian maupun diluar, adalah 15.467 jiwa.

Untuk mengatur urusan dinas dalam Ksatrian, kelancaran tugas, keamanan dan ketertiban, hak dan kewajiban penghuni, serta hubungan antar penghuni Ksatrian yang demikian besar, maka Kakorbrimob Polri mengeluarkan Surat Keputusan Kakorbrimob Polri No. Pol: Skep/24/VII/2003 tertanggal 31 Juli 2003 tentang Peraturan Urusan Dinas Dalam Ksatrian Amji Attak Mako Korps Brimob Polri.

Surat keputusan ini selain mengatur tentang urusan kedinasan internal seperti penjagaan/dinas piket, apel/upacara, tata cara penggunaan/peminjaman pakai senjata api, seragam dan atribut korps dan sebagainya, juga mengatur tentang sikap dan perilaku anggota serta anggota keluarganya yang tinggal didalam Ksatrian, seperti keharusan dan larangan bagi penghuni Ksatrian, sikap dan perilaku dalam hubungan antara bawahan dan atasan (Bab IV pasal 7, 8, 9), perilaku di hadapan umum (Bab IV pasal 10), dan tata cara meninggalkan Ksatrian (Bab V)

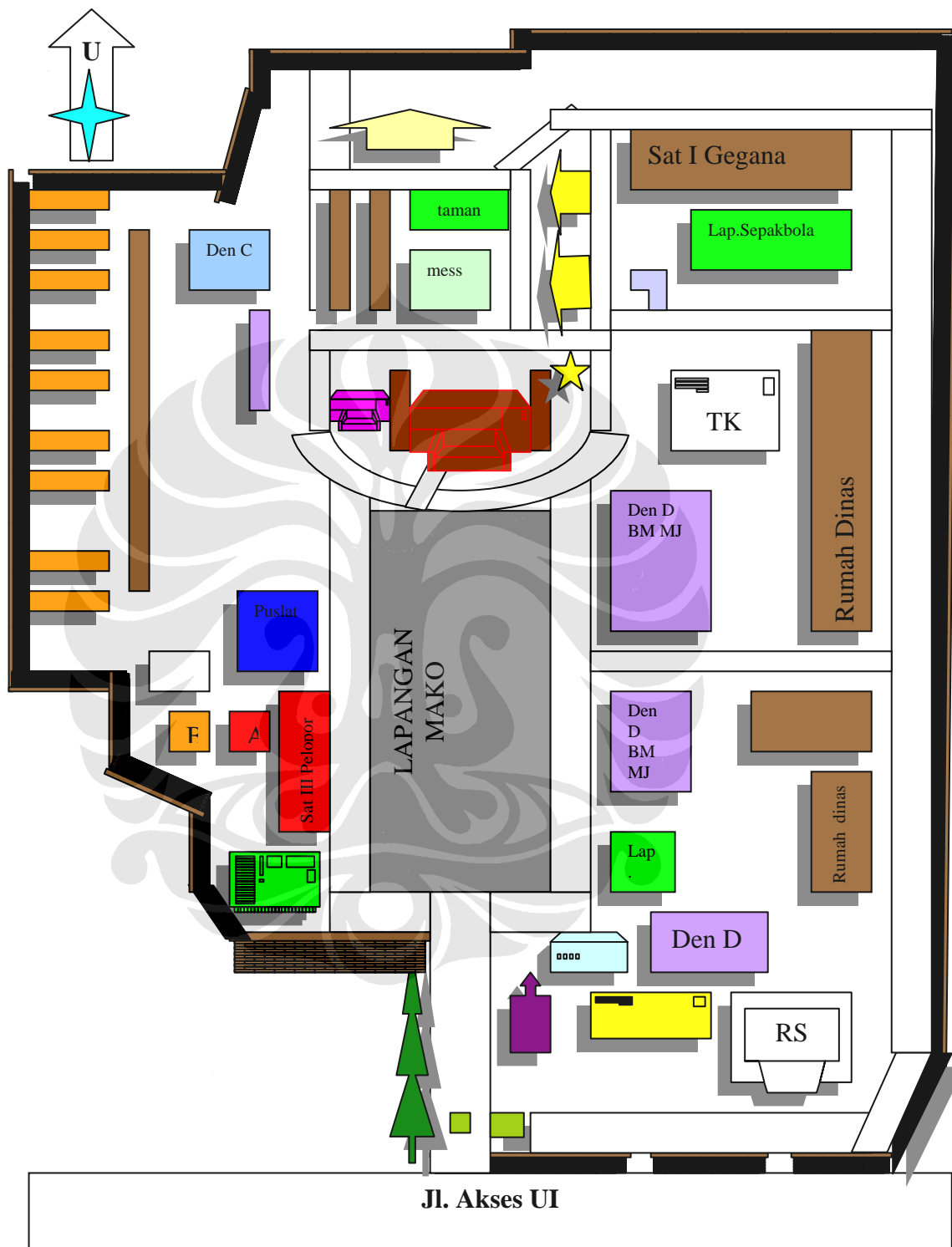
TABEL 3.3.1

**REKAP ANGGOTA KORBRIMOB KELAPA DUA DAN
KELUARGA**

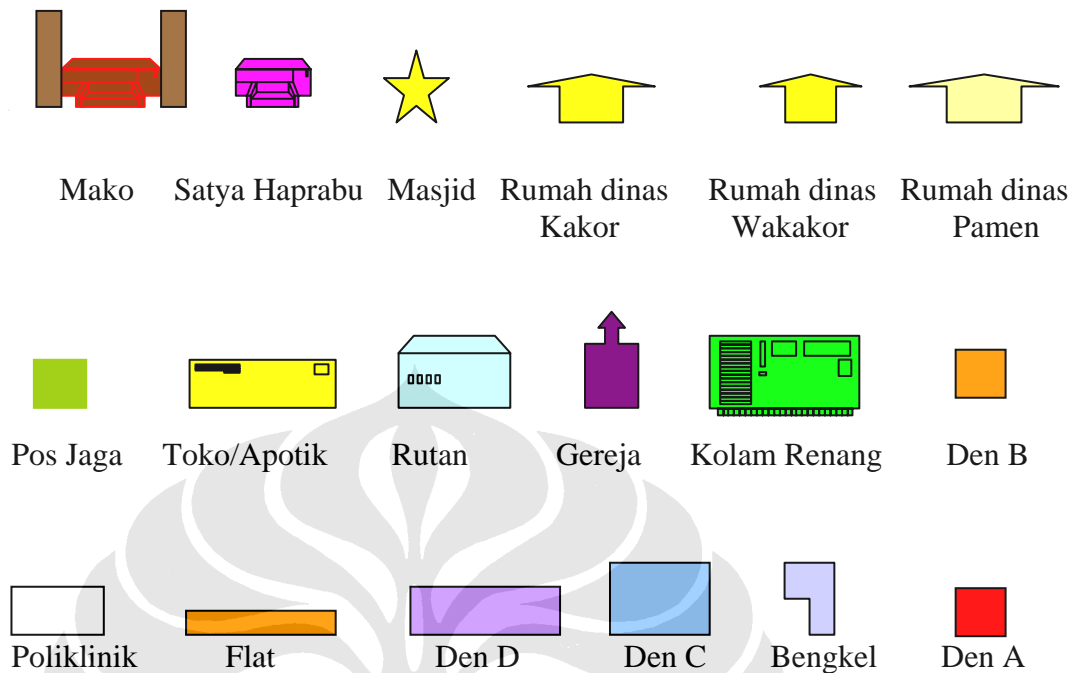
Pangkat	Jumlah Anggota	Suami/Istri	Anak
Irjen	1	1	2
Brigjen	1	1	3
Kombes	9	9	17

AKBP	13	13	15
Kompol	28	28	50
AKP	80	80	104
Iptu	66	62	52
Ipda	69	59	40
Aiptu	22	22	30
Aipda	11	9	16
Bripka	411	212	309
Brigadir	614	583	1029
Briptu	406	350	266
Bripda	3952	3503	2888
Abrip	0	0	0
Abriptu	5	3	1
Abripda	2	5	1
Bharaka	4	0	0
Bharatu	5	0	0

DENAH 3.3.2 TATA RUANG MAKO KORBRIMOB



Legenda Tata Ruang Mako Korbrimob:



3.4. POLA PEMBINAAN

Sebagai sebuah satuan khusus yang dimiliki Polri dengan kemampuan spesifik guna menangkal kejahatan dalam negeri dengan kadar tinggi, maka untuk menjalankan tugas pokok, fungsi dan perannya, Korps Brimob memiliki kemampuan Penanggulangan Huru Hara (PHH), Reserse Mobile (Resmob), Penjinakan Bahan Peledak (Jihandak), Perlawanan Teror (Wanteror), dan *Search and Rescue* (SAR).

Untuk itu maka diperlukan personel-personel yang berkualitas dan berdedikasi tinggi. Personel-personel tersebut haruslah benar-benar pilihan melalui seleksi penerimaan yang ketat. Hal tersebut tertuang dalam Lampiran Kapolri No.Pol. : Kep/20/IX/2005 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia 2005 – 2009. Khususnya dalam bab pengembangan strategi keamanan dan

ketertiban, salah satunya dinyatakan tentang akan diterapkannya proses rekrutmen dan seleksi Brimob yang lebih ketat dibanding polisi reguler.

Selama ini pola pembinaan yang dilakukan Korps Brimob sejak tahap awal yaitu proses rekrutmen hingga proses pendidikan dan pelatihan di Watukosek, Sukabumi, baik dari tingkat Dasta maupun Daspa selama 3 bulan belum dapat dianggap ideal dalam membentuk personel Brimob yang unggul dalam dimensi otot, hati dan otak. Hal ini karena pembinaan yang ada hanya menekankan pada pembentukan fisik dan kemampuan taktis operasional semata. Pembinaan kepribadian dan mental personel hanya merupakan formalitas dalam pengisian penilaian tanpa pemahaman dan pendalaman akan nilai filosofis motto Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan.

Untuk itu maka diperlukan sebuah perubahan dalam proses rekrutmen dan pendidikan serta pelatihan anggota Brimob sebagai bagian dari pola pembinaan dan pembentukan perilaku anggota sesuai kriteria Brimob, sebagai berikut:

A. Proses Rekrutmen

- Seleksi penerimaan anggota Korbrimob yang selama ini mensyaratkan hal yang sama dengan penerimaan polisi umum, harus ditingkatkan standarnya dengan penelusuran latar belakang, prestasi akademik, kemampuan fisik, mental kepribadian, tingkat intelegensi, kemampuan sosialisasi, emosional, bakat dan minat, serta pengetahuan khusus tentang bidang tugas Brimob Polri.
- Penelusuran kecenderungan perilaku melalui investigasi latar belakang dan kecenderungan-kecenderungan yang pernah dilakukan sebelumnya.

- Mengadakan proses seleksi yang sama terhadap anggota dari satuan lain yang dikirim dan dititipkan untuk menjalani pembinaan di Brimob Polri.
- Melengkapi psikotes dan sosiometri dengan item tes intelegensi, psikiatri, dan pengendalian emosi sebagai persyaratan penting dalam kecepatan proses beradaptasi dengan masyarakat dan lingkungan, sebagai kemampuan kesigapan sebuah satuan yang dapat di BKO kan secara cepat dan mendadak ke daerah lain yang berbeda budaya masyarakatnya.

B. Proses Pendidikan dan Pelatihan

- Pola pendidikan dan pelatihan yang menitik beratkan pada aspek fisik dan kemampuan taktis operasional harus pula diimbangi dengan pengajaran pemahaman mental kepribadian yang baik, penjiwaan motto korps, dan pendalaman nilai spiritual keagamaan.
- Pendidikan dan pelatihan yang dijalani harus berpengaruh secara signifikan dalam membentuk perilaku yang tidak arogan dan berorientasi fisik, dengan pengajaran standar kemampuan pengetahuan akan hukum dan kode etik.

Proses seleksi, pendidikan dan pelatihan yang tepat sasaran seperti yang disarankan diatas, diyakini dapat menghasilkan personil yang baik dan kecil kemungkinan berperilaku menyimpang. Hal ini karena proses tersebut dapat menghasilkan *output* personel yang baik dalam mental, tinggi idealisme pengabdianya, baik jasmani dan rohaninya, serta bagus kemampuan profesionalnya.

Seluruh proses mulai seleksi, pendidikan, penempatan, perawatan, dan pengakhiran tugas dilaksanakan dengan bersih, bebas dari manipulasi dan korupsi.